

PERAN KOMUNIKASI DALAM PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH DI KABUPATEN SEMARANG, PROPINSI JAWA TENGAH

Siwi Gayatri dan Dyah Mardiningsih
Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro Semarang
siwi_gayatri@yahoo.co.id

ABSTRACT

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi dan merumuskan strategi komunikasi pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Semarang. Tulisan ini merupakan review literatur berbagai bahan tertulis berkenaan kegiatan komunikasi pembangunan peternakan sapi perah. Tujuan akhirnya adalah untuk dapat meningkatkan pembangunan peternakan di Kabupaten Semarang melalui strategi komunikasi yang lebih sesuai. Pemerintah harus mengembalikan konsep kegiatan penyuluhan sebagai proses pendidikan dengan memprioritaskan penyampaian informasi pada petani dan keluarganya. Pemerintah mendorong lebih banyak media komunikasi yang memberikan alokasi yang lebih pada topik-topik yang berhubungan dengan pertanian atau pengembangan pembangunan pedesaan. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan termasuk kesempatan yang sama untuk mengakses hasil pembangaunan

Kata Kunci : komunikasi, pengembangan ternak sapi perah

PENDAHULUAN

Di Kabupaten Semarang umumnya skala pemilikan ternak sapi perah rata-rata baru 2 – 3 ekor dengan sistem manajemen yang masih bersifat tradisional sehingga dengan skala pemilikan yang rendah ini memberikan dampak sosial ekonomi khususnya terhadap pendapatan/keuntungan peternak. Pendapatan yang rendah akan berpengaruh terhadap kemampuan peternak dalam mengelola usahanya, sementara harga input produksi terus meningkat dari tahun ketahun. Hal ini merupakan tekanan yang cukup berat bagi peternak untuk memperbaiki usaha peternakan sapi perahnya, selain karena produktivitas ternak rendah, kemampuan permodalan yang sangat rendah dan juga tingkat pendidikan peternak yang kurang. Salah satu cara untuk mengoptimalkan produksi adalah dengan meningkatkan tingkat pengetahuan peternak sehingga mampu menjaga kualitas bibit sapi perah, baik secara fisik, maupun non fisik. Tingkat pengetahuan peternak mengenai aspek manajemen ternak sapi perah masih harus ditingkatkan melalui program penyuluhan yang terarah.

Peran komunikasi dalam pengembangan peternakan tidak bisa di pungkiri keberadaannya. Tetapi sampai saat ini, hal tersebut masih “dianaktirikan oleh” penentu kebijakan. Jika kita melihat peran pembangunan seperti pengembangan sumber daya manusia, kita bisa melihat bahwa komunikasi mempunyai peran yang penting, khususnya ketika berhadapan dengan peternak. Peternak harus di beri informasi (melalui media penyuluhan), di motivasi oleh penyuluh untuk dapat menerima ide, pengetahuan dan teknologi baru dan berani memutuskan masa depannya melalui pemberdayaan masyarakat. komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi.

Menurut Gumilar (2009), komunikasi (sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik) di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan. Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat yang dituju dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan- gagasan yang disampaikan.

Komunikasi dalam pembangunan peternakan seharusnya sejalan dengan teori “Development Communication”, adalah segala bentuk informasi yang dapat di aplikasikan dalam mendukung pembangunan suatu negara (World Bank, 2002). Di Indonesia, peran komunikasi dalam pembangunan bidang peternakan sudah di mulai sejak tahun 80’an di bawah Departemen Penerangan yang berkerja sama dengan Departemen Pertanian.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi dan merumuskan strategi komunikasi pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Semarang. Tulisan ini merupakan review literatur berbagai bahan tertulis berkenaan kegiatan komunikasi pembangunan peternakan sapi perah. Tujuan akhirnya adalah untuk dapat meningkatkan pembangunan peternakan di Kabupaten Semarang melalui strategi komunikasi yang lebih sesuai.

KEGIATAN PENYULUHAN

Sebagai tindak lanjut Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) yang dicanangkan oleh Presiden pada bulan Juli 2005, pada tanggal 3 Desember 2005 telah dicanangkan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian (RPP). Pada hakekatnya, Revitalisasi Penyuluhan Pertanian adalah suatu upaya mendudukkan, memerankan dan memfungsikan serta menata kembali penyuluhan pertanian agar terwujud kesatuan pengertian, kesatuan korp dan kesatuan arah kebijakan. Program revitalisasi difokuskan pada beberapa sub program, yaitu penataan kelembagaan penyuluhan pertanian, peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh pertanian, peningkatan kelembagaan dan kepemimpinan petani, peningkatan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dan pengembangan kerjasama antara sistem penyuluhan pertanian dan agribisnis (Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian, 2008). Program ini berupaya memperbaiki sistem dan kinerja penyuluhan pertanian yang semenjak akhir 1990-an sangat menurun kondisinya.

Penyuluhan merupakan bentuk komunikasi yang efektif dalam menyebarkan pesan pembangunan. Konsep penyuluhan sebagai bentuk pemberian informasi khususnya untuk warga pedesaan dari orang tua sampai anak-anak, fokus pada penyebaran informasi pertanian bertujuan untuk mengubah taraf hidup petani dan keluarganya (Nambiro et al, 2005). Penyuluhan merupakan suatu bentuk pendidikan informal tidak hanya untuk petani tetapi juga seluruh individu yang ada di pedesaan. Seperti halnya pendidikan formal, penyuluhan menyertakan pertukaran informasi, pendidikan dan nilai (Rivera dan Qamar, 2003).

Fungsi penyuluhan tidak hanya memberikan informasi untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, tetapi juga kegiatan penyuluhan bermanfaat untuk mendorong partisipasi petani dalam proses pengambilan keputusan yang bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas ternak (Ramírez dan Wendy, 2004). Selain itu, output kegiatan penyuluhan tidak hanya meningkatkan kuantitas produksi saja, tetapi juga menginspirasi peternak dan

keluarganya untuk merubah taraf hidup. Dengan kegiatan penyuluhan diharapkan terjadi kesempatan yang sama untuk mengakses dan mendapatkan keuntungan dari pembangunan. Program penyuluhan yang efektif sebaiknya berasal dari ide peternak itu sendiri sesuai dengan kebutuhan. Partisipasi peternak di harapkan dapat mendukung program penyuluhan untuk menyelesaikan masalah yang di hadapi oleh peternak (World Bank, 2002).

Gumilar (2009) menjelaskan bahwa proses pembangunan saat ini harus berakar dari bawah (grassroots), dengan kata lain pembangunan harus menganut paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat. Dengan demikian, jika berhubungan dengan pembangunan peternakan, perlu adanya partisipasi secara aktif, penuh inisiatif dan inovatif dari peternak itu sendiri. Peternak diberi kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam proses pembangunan dan menikmati hasil pembangunan tersebut sesuai dengan kemampuannya. Sehingga, orientasi pembangunan akan lebih berhasil guna dan berdaya guna,

Saat ini isi program penyuluhan peternakan merupakan integrasi beberapa bidang seperti pendidikan, kesehatan yang di harapkan mendukung pemberdayaan masyarakat pedesaan. Penyuluhan merupakan ujung tombak pembangunan peternakan di lapangan yang berperan strategis terhadap pencapaian swasembada produk peternakan yang berkelanjutan. Sehingga, keberhasilan pelaksanaan revitalisasi penyuluhan memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat pelaku usaha di bidang peternakan.

PERANAN MEDIA KOMUNIKASI

Saat ini, penyuluh banyak menggunakan media massa seperti media tertulis atau media audio visual untuk menyebarkan informasi kepada peternak (Kifli, 2007). Hal ini dikarenakan media massa termasuk murah dan mudah dalam perencanaan desainnya. Selain

itu, mudahnya penyebaran informasi serta waktu penyebaran yang serempak merupakan kelebihan dari media massa untuk menyebarkan informasi tentang pembangunan peternakan.

Media massa sebagian besar sebagai sarana untuk melayani persuasi dari atas ke bawah (top-down) atau sebagai saluran untuk menyampaikan informasi dari pemilik otoritas kepada masyarakat (Gumilar, 2009). Banyak penyuluh yang menggunakan media komunikasi tradisional untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan untuk menyempurnakan keikutsertaan yang lebih besar dari warga pedesaan di dalam proses pengembangan.

Peranan media massa dalam pengembangan peternakan dapat diwujudkan melalui program-program pengembangan pers dan media massa, peningkatan prasarana penyiaran dan jaringan informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan informasi publik (Gumilar, 2009). Hal ini bertujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana komunikasi dan informasi bagi terselenggaranya proses sosialisasi, artikulasi, komunikasi secara lebih baik. Selain itu pemerintah perlu mendorong perluasan jaringan informasi dan penyiaran publik, khususnya di daerah- daerah yang masih terpencil untuk membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang luas secara cepat dan akurat (Ramírez dan Wendy, 2004).

REKOMENDASI

1. Pemerintah harus mengembalikan konsep kegiatan penyuluhan sebagai proses pendidikan dengan memprioritaskan penyampaian informasi pada petani dan keluarganya. Kegiatan penyuluhan bermanfaat untuk menyampaikan informasi khususnya bidang pertanian dengan tujuan tidak hanya meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi tetapi juga untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2. Peternak harus di dorong untuk memahami pentingnya mengakses komunikasi sehingga peternak mampu memahami kebutuhan dan mengerti tentang masalah yang dihadapi.

Pemerintah di harapkan mendorong banyaknya informasi yang di berikan pada warga pedesaan khususnya informasi yang berhubungan dengan peternakan sehingga informasi tidak hanya di dominasi informasi yang bersifat hiburan tetapi juga informasi yang dapat mendorong partisipasi masyarakat.

3. Menformulasikan suatu kebijakan yang tidak hanya bersifat lokal dengan mengembalikan peran penyuluhan sebagai salah satu penggerak kegiatan pembangunan pedesaan.
4. Mendukung pengembangan media komunikasi yang dikhususkan untuk orang-orang pedesaan, seperti koran masuk desa dan radio siaran pedesaan.
5. Pemerintah mendorong lebih banyak media komunikasi yang memberikan alokasi yang lebih pada topik-topik yang berhubungan dengan pertanian atau pengembangan pembangunan pedesaan.
6. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan termasuk kesempatan yang sama untuk mengakses hasil pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gumilar, G. 2009 Peranan Komunikasi dalam pembangunan. www.docstoc.com
- Kifli, G. C. 2007. Strategi Komunikasi Pembangunan Pertanian Pada Komunitas Dayak Di Kalimantan Barat. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 25 No. 2, Desember 2007 : 117 – 125.
- Nambiro, E., Omiti, J., and Mugunieri, L., 2005. Decentralization and Access to Agricultural Extension Services in Kenya. SAGA Working Paper, October 2005
- Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian. 2008. Pedoman Revitalisasi Penyuluhan Pertanian. Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian. Badan Pengembangan SDM Pertanian Deptan. <http://www.deptan.go.id/bpsdm/pedum/PedomanRPP2008.pdf>.
- Ramírez, R. and Wendy, Q. 2004. Communication For Development. International Development Research Centre and the Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2004

Rivera, W. M dan Qamar, M.K. 2003. A New Extension Vision For Food Security, Challenge to change. Food And Agriculture Organization Of The United Nations. www.fao.org.

World Bank (2002) The right to tell: The role of mass media in economic development. Washington, DC: World Bank Institute. www.worldbank.org.